

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan diberlakukannya Peraturan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat pembuat komitmen dan panitia/pejabat pengadaan di lingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut ditegaskan, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada masing-masing instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan kegiatan/proyek, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan efektivitas dan keseragaman dalam pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan atas kegiatan pengadaan barang/jasa

pemerintah sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010, maka dipandang perlu untuk menyediakan pedoman bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan audit pengadaan barang/jasa.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melakukan audit pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Ngawi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ngawi, Inspektorat Kabupaten Ngawi termasuk di dalam Struktur Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ngawi. Inspektorat Kabupaten Ngawi dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab dan berkedudukan langsung di bawah Bupati Ngawi.

Dalam melaksanakan audit pengadaan barang/jasa Inspektorat Kabupaten Ngawi masih menghadapi kendala-kendala dalam persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit maupun dalam pemantauan tindak lanjut hasil audit sehingga perlu adanya penyusunan kelengkapan pedoman audit secara *detail* agar diperoleh pedoman audit yang mengatasi kendala-kendala yang telah ada untuk pekerjaan konstruksi di Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Inspektorat Kabupaten Ngawi dalam melakukan audit atas kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Ngawi, belum mengacu pada Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (Keputusan Kepala BPKP No. KEP-378/K/1996 tanggal 30 Mei 1996), sehingga dalam pembuatan laporan hasil audit pengadaan barang/jasa belum menunjukkan hasil penilaian atas

kondisi pengadaan barang/jasa yang diaudit ditinjau dari prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Laporan hasil audit pengadaan barang/jasa tersebut belum dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam rangka memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasa agar lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, beberapa perumusan masalah penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Apakah kelemahan-kelemahan yang ada dalam Pelaporan Hasil Pemeriksaan Fisik Inspektorat Kabupaten Ngawi pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yaitu Pembangunan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kecamatan Pitu.
2. Bagaimanakah cara penyusunan kelengkapan pedoman audit secara *detail* untuk menyempurnakan audit yang telah ada, agar sesuai dengan standar audit fungsional pemerintah.

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Pelaporan Hasil Pemeriksaan Fisik Inspektorat Kabupaten Ngawi pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

yaitu Pembangunan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kecamatan Pitu.

2. Menyusun kelengkapan pedoman audit secara *detail* untuk kasus audit konstruksi yang terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan pemantauan tindak lanjut hasil audit.

#### **D. Ruang lingkup penelitian**

Ruang lingkup pengembangan sistem audit pengadaan barang/jasa ini adalah menyusun kelengkapan pedoman audit secara detail untuk kasus audit konstruksi yang terdiri atas 4 komponen, yaitu persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan pemantauan tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi pada Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Ngawi yaitu Pekerjaan Pembangunan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kecamatan Pitu Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.

#### **E. Manfaat penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan sistem audit pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi pada Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah :

1. Untuk Inspektorat Kabupaten Ngawi

Aparat pengawasan intern yaitu pemeriksa Inspektorat Kabupaten Ngawi mempunyai pedoman atau langkah-langkah dalam melaksanakan tugas audit pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, pelaporan hasil audit

pengadaan barang/jasa yang dihasilkan Inspektorat Kabupaten Ngawi sesuai dengan standar audit pemerintah, laporan hasil audit telah menunjukkan hasil penilaian atas kondisi pengadaan barang/jasa yang diaudit ditinjau dari prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

## 2. Untuk Pemerintah Daerah

Laporan hasil audit pengadaan barang/jasa tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam rangka memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasa agar lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel untuk waktu yang akan datang.

## 3. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah

Semua satuan kerja perangkat daerah yang sedang melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi baik secara teknis maupun administrasi dan akibat-akibat yang ditimbulkan sehingga Inspektorat Kabupaten Ngawi dalam melakukan pembinaan dapat menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasa agar lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel untuk waktu sekarang dan yang akan datang sehingga dapat menghemat anggaran belanja daerah.

## 4. Untuk masyarakat

Masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan daerah yang bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat dengan kualitas konstruksi sesuai standar nasional dan dapat dipakai dalam waktu yang lama serta tidak membahayakan bagi penggunaannya.